



**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PADA PEMERINTAHAN KOTA BOGOR
PERIODE 2019 DAN 2020**

Skripsi

Dibuat oleh:
Danika Septhi Moranie
022117217

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
Juni 2022**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAHAN
KOTA BOGOR PERIODE 2019 DAN 2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A.,
CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAHAN
KOTA BOGOR PERIODE 2019 DAN 2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022

Danika Septhi Moranie
022117217

Menyetujui

Ketua Sidang Penguji

(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,C.A.,
CSEP., QIA., CFE., CGCAE

Ketua Komisi Pembimbing

(Monang Situmorang, Ak.,MM.,CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edi Surono, Drs., M.M)



Handwritten signatures of the examiners and supervisors, including the Chairman of the Examining Board and the Chair and Member of the Supervisory Committee.

Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danika Septhi Moranie

Nomor Pokok Mahasiswa : 022117217

Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2019 dan 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari Produk Skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2022


Danika Septhi Moranie



022117217

Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan praktik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DANIKA SEPTI MORANIE, 022117217. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2019 dan 2020. Dibawah bimbingan : MONANG SITUMORANG dan SIGIT EDI SURONO.2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan mengetahui bagaimana perbandingan antara anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2019 dan 2020.

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dengan menyebarkan kuesioner melalui *google formulir* kepada 30 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif exploratif dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif statistik, data diuji menggunakan SPSS versi 25 dengan analisis deskriptif statistik, uji validitas dan uji realibilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan informasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, dan menunjukkan bahwa hasil dari kuesioner yaitu valid dan reliabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

PRAKATA

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi yaitu “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2019 dan 2020”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, maka penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis serta membantu baik dalam bentuk moril maupun materil kepada :

1. Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus, ikhlas, serta memberi dukungan dalam bentuk moril maupun materil. Serta, adik-adik saya, yang selalu memberi doa serta motivasi kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,C.A.,CSEP.,QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Monang Situmorang, Ak.,MM.,CA selaku ketua komisi pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Sigit Edi Surono, Drs., M.M selaku anggota komisi pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis, dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
8. Bapak H. Denny Mulyadi, S.E selaku kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, khususnya kepada Bidang Penatausahaan Keuangan, yang telah membantu penulis dengan memberikan data maupun informasi yang penulis butuhkan untuk keperluan penelitian.

10. Serlia Dara Puspitasari sebagai teman dan kerabat baik saya, terimakasih atas motivasi yang selalu diberikan kepada saya, selalu mendoakan yang terbaik dan selalu menyempatkan waktunya untuk terus memberikan semangat serta dukungannya.
11. Keluarga besar WAPALAPA yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat selama perkuliahan yaitu Laras Martyani, Siti Nurholisa, Putri Astia, Retno Trisetyowati, Pinqa Alifya, Citra Berliana, Weri Indah, Siti Ulya Ziana, dan Fitriani Salihah yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan juga memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat, maupun bantuan. Terima kasih selalu menemani dalam keadaan senang maupun duka, dan kebersamaannya sampai saat ini.
13. Teman-teman Akuntansi kelas F angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, doa, dan terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bogor,

2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Akademis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.3 Komponen Akuntansi Sektor Publik	10
2.2 Standar Akuntansi Pemerintah	10
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah	13
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	13

2.4.2 Penerapan Pelaporan Keuangan.....	14
2.4.3 Komponen Laporan Keuangan	15
2.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	16
2.5 Laporan Realisasi anggaran	17
2.5.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	17
2.5.2 Struktur Laporan Realisasi Anggaran	18
2.5.3 Periode Pelaporan	18
2.5.4 Isi Laporan Realisasi Anggaran	19
2.5.5 Informasi Yang Disajikan Laporan Realisasi Anggaran Dalam CaLK	20
2.5.6 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan LRA.....	22
2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	24
2.6.1 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.6.2 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4 Operasionalisasi Variabel	32
3.5 Metode Penarikan Sampel	34
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.7 Metode Pengolahan Data/ Analisis Data	36
3.7.1 Analisis Deskriptif	36
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif	36
3.7.3 Uji Kualitas Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah	39
4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang.....	40
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	45
4.2.1 Analisis Deskriptif	45
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.2.3 Uji Kualitas Data.....	58
4.3 Pembahasan.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70

4.1 Simpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah.....	3
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu... ..	25
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel... ..	33
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	46
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019... ..	48
Tabel 4.3 Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	50
Tabel 4.4 Realisasi Surplus/Defisit Anggaran daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019..	51
Tabel 4.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	52
Tabel 4.6 Realisasi SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2020 dan 2019... ..	54
Tabel 4.7 Skor Nilai Rata-Rata.....	55
Tabel 4.8 Hasil Pengumpulan Data... ..	56
Tabel 4.9 Hasil Jawaban Kuesioner Mengenai Penerapan PSAP Nomor 02.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas... ..	59
Tabel 4.11 Nilai Croncbach Alpha... ..	60
Tabel 4.12 Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dengan PSAP Nomor 02.....	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 -2020.....	4
Grafik 1.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2018 - 2020.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah... ..	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Riset/Penelitian/Magang	76
Lampiran 2 Bukti Persetujuan Telah Diseminarkan	78
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor	80
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 5 Hasil Jawaban Kuesioner	86
Lampiran 6 Hasil Deskriptif Statistik	87
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas	88
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era sekarang, pemerintah semakin berlomba-lomba untuk mewujudkan *good governance*. Hal ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Bentuk khusus peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal nasional adalah dengan merumuskan kebijakan akuntansi pemerintah dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjadi acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk menyusun laporan keuangan dan bagi auditor dan pengguna laporan keuangan untuk menemukan solusi untuk masalah.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010:11) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang merangkum sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi selama satu periode laporan. Telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan standarisasi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas dan pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (PSAP No. 02).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dengan diterapkannya berbagai peraturan, pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun setelah berlakunya beberapa undang-undang tersebut, masih banyak pemerintah yang belum

mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI. Seperti yang dapat dilihat pada table data hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 (IHPS I Tahun 2020)

Tabel 1.1

Opini LKPD Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

Tahun	Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2015	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%

Sumber : BPK RI (IHPS I 2020)

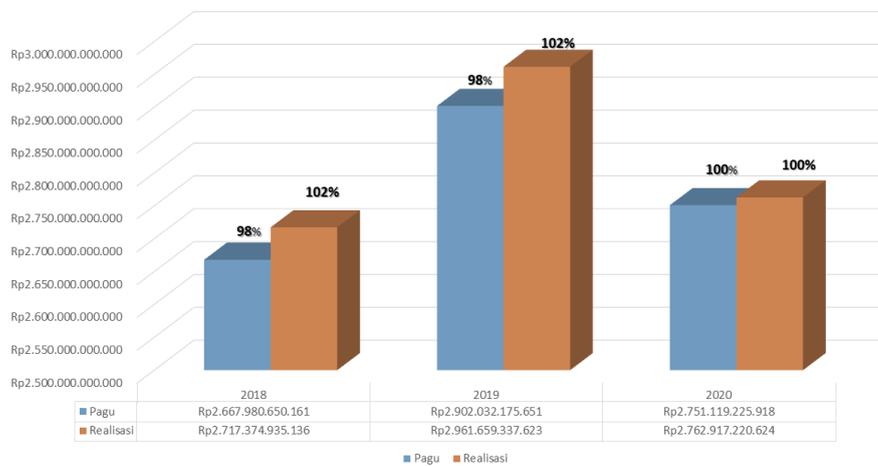
Dilihat dari data diatas, terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di tingkat kabupaten maupun kota. Dalam penjelasan opini yang diberikan oleh BPK menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I tahun 2020 mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian intern, permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan *non permanent*, serta mayoritas disebabkan karena pengelolaan asset tetap yang belum akuntabel. Dari beberapa fenomena-fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan akan kesesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan khususnya pada Laporan Realisasi Anggaran di pemerintah pusat maupun daerah dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dapat diketahui pemerintah Kota Bogor telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu komponen laporan keuangan pemerintah. Selain itu Kota Bogor mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, sejak tahun 2016 hingga 2020.

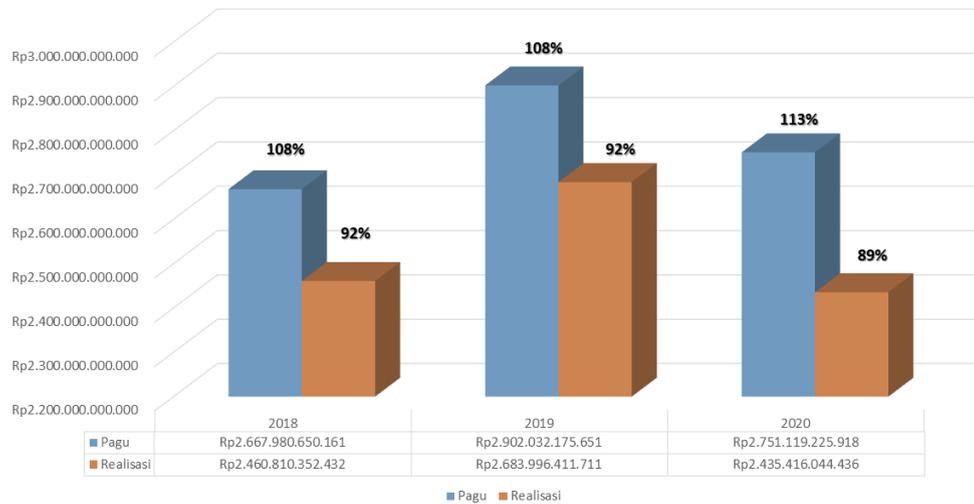
Terlepas dari predikat WTP Kota bogor telah melaksanakan transparansi keuangan sejak tahun 2014 yang dapat diakses dalam website : <https://kotabogor.go.id/>. Sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat, laporan keuangan pada tahun 2020 belum terpublish/ transparan terhadap masyarakat hingga saat ini. Peristiwa tersebut menimbulkan dugaan adanya kurangesesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Kota Bogor

Grafik 1.1
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2018 – 2020



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bogor pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Pada tahun 2019 pendapatan pemerintah Kota Bogor mengalami kenaikan anggaran yang cukup tinggi mencapai Rp. 2.961 miliar dari total yang dianggarkan senilai Rp. 2.902 miliar. Namun pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan cukup dengan nilai Rp. 2.762 dari total anggaran sebesar Rp. 2.751 miliar, atau sebesar 7% dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2019.

Grafik 1.2
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bogor
Tahun 2018 – 2020



Dilihat dari grafik diatas, realisasi belanja pemerintah kota Bogor selama tiga tahun terakhir tidak sesuai target anggaran dengan persentase realisasi belanja dibawah 100%. Jika dilihat dari kedua grafik diatas, Kota Bogor mengalami surplus dari tahun ke tahun. Sehingga dapat disimpulkan, apakah belanja daerah yang direncanakan oleh pemerintah Kota Bogor telah terealisasi dengan baik. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan atas bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan. Jika tidak sesuai dengan standar maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. Standar ini ditetapkan untuk memenuhi kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah/daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Diantri (2018) bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah baik namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sehingga menyebabkan anggaran pertahunnya menurun. Karena dalam faktanya masih ada kegiatan-kegiatan yang pengeluarannya lebih sedikit dari anggaran yang telah tersedia. Sehingga dalam realisasinya belum sesuai dengan harapan serta dapat

membuat anggaran tahun berikutnya menurun. Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa anggaran yang masih belum terealisasi. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.

Irawan (2016) menyimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dan Penyajian LRA secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah Yuniarti (2019) menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten telah menyajikan delapan komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA. Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Penerapan LRA di Kabupaten Klaten hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02, hanya ada satu yang tidak sesuai yaitu transaksi dalam mata uang asing karena memang Kabupaten Klaten tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing.

Penelitian Ifa Detri (2014) menunjukkan bahwa, penyajian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dilihat dari format Laporan Realisasi Anggaran dan tidak terdapat adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAP No 02 pada Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2019 dan 2020.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kesimpulannya bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Bogor.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka beberapa masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor periode 2019 dan 2020 ?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Kota Bogor Periode 2019 dan 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Kota Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, yang sebelumnya telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis anggaran yang dibandingkan dengan realisasi anggaran periode 2019 dan 2020 Pemerintah Kota Bogor.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02 pada pemerintah Kota Bogor Periode 2019 dan 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak. Kemudian penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media referensi dan tukar pikiran mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dan bagi Pemerintahan dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam melakukan penyempurnaan dalam Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

1.4.2. Kegunaan Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan masukan dan referensi mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Kemudian dapat menjadi sarana media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 02. Selain itu dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan pemahaman mengenai sistem Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Indra Bastian (2014:6) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim (2014:18) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengembalian keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat yang menjadi informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Informasi keuangan yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun bagi publik. Informasi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta sebagai pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas dana publik yang telah digunakan.

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara lain :

- a) Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam alokasi mengelola sumber daya secara efisien dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan untuk manajer melaporkan pelaksanaan tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

2.1.3 Komponen Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Setiap organisasi sektor publik memiliki ketetapan dalam akuntansi sektor publik. Komponen-komponen yang mempengaruhi akuntansi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi (Haryanto dkk:2007).

- 1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi meliputi ; tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, pertumbuhan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan infrastruktur.

- 2) Faktor politik

Faktor politik meliputi ; hubungan negara dengan masyarakat, tipe rezim yang berkuasa, elit politik dan massa, kelembagaan, legitimasi pemerintah, ideologi negara serta jaringan internasional.

- 3) Faktor kultural

Faktor kultural meliputi ; keragaman suku, budaya, rasa, bahasa, agama serta budaya, historis, karakteristik masyarakat, sistem nilai di masyarakat, sosiologi masyarakat dan tingkat pendidikan.

- 4) Faktor demografi

Faktor demografi meliputi ; struktur usia penduduk, tingkat kesehatan, pertumbuhan penduduk migrasi.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di

lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan. (Halim dan Kusufi, 2012:244)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa lainnya. Jika dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi tidak sesuai dengan standar maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. SAP menentukan jumlah pengungkapan harus disajikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi penyajian laporan keuangan pemerintah (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2010).

Salah satu upaya kongkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia, sehingga SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan pada sektor publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan 12 PSAP yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
- 2) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
- 4) PSAP 03 Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6) PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06 Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10 Koreksi Kesalahan

- 12) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi
- 13) PSAP 12 Laporan Operasional
- 14) PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan BLU (Badan Layanan Umum)

2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. PAD mencakup daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan mencakup dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang, uang atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai (honorium atau upah), belanja barang atau jasa, dan belanja modal.
2. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup hibah, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Di Indonesia, APBD setiap daerah berbeda-beda besarnya. Struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan. Hal ini Hal ini bergantung dari sumber daya alam dan

tingkat aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda itu mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakatnya, yang berakibat pada penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak dan retribusi. Secara menyeluruh potensi keuangan daerah, ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Sumber pendapatan baru
- c. Kondisi awal suatu daerah
- d. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan
- e. Kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Rill
- f. Inflasi
- g. Penyesuaian tarif
- h. Pembangunan baru

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.4.2 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Laporan Arus Kas (LAK)
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok pada entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*)

2.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1. Relevan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna informasi. Informasi yang relevan adalah :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- d) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

2.5.1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (Halim dan Kusufi, 2014:284).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah memiliki dua tujuan yaitu :

- 1) Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut (PP Nomor 71 Tahun 2010):

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- b) Cakupan entitas pelaporan
- c) Periode yang dicakup
- d) Mata uang pelaporan
- e) Satuan angka yang digunakan

2.5.3. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.5.4. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto, dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

2.5.5. Informasi yang Disajikan Laporan Realisasi Anggaran Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

b. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

c. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

d. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

e. Akuntansi Surplus/Defisit LRA

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

g. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

h. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

i. Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

j. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

k. **Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

2.5.6. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran

2.4.6.1 Pengakuan

1. **Pendapatan**

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. **Belanja**

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

3. **Transfer**

Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran di rekening kas umum daerah pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer

4. **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan daerah diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.4.6.2 Pengukuran

1. Pendapatan

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah Transfer. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

3. Transfer

Pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

4. Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs

dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.4.6.3 Penyajian

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, penyajian pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan SiLPA/SiKPA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

2.4.6.4 Pengungkapan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :

- a) Anggaran
- b) Realisasi
- c) Persentase pencapaian
- d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi
- e) Perbandingan dengan periode yang lalu
- f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu
- g) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan
- h) Rincian lebih lanjut menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi
- i) Rincian lebih lanjut pembiayaan, dan
- j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan untuk penggunaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dengan struktur sebagai berikut :

- a) Perbandingan dengan periode yang lalu
- b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu
- c) Rincian yang diperlukan
- d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Variabel Independen : PSAP No. 02	Mokhamad Irawan (2013)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013	Kualitatif	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013
2.	Variabel Independen : Penerapan PSAP 02	Ifa Detri Stefani (2014)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Anggaran (Studi Kasus Pada	Kualitatif	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai

			Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)		dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.
3.	Variabel Independen : Penerapan PSAP Nomor 2	Yuni Maya Safira (2016)	Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)	Kualitatif	Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Pasuruan sesuai dengan PSAP Nomor 2, walaupun beberapa item belum diterapkan karena tidak adanya transaksi. Kabupaten Pasuruan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat diukur menggunakan maqhosid syariah.
4.	Variabel Independen : PSAP Nomor 02	Nurul Rahmi Sandya (2018)	Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan	Kuantitatif	Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

			Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Sumatera Utara		
5.	Variabel Independen : PSAP Nomor 02	Paidi (2019)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)	Kualitatif	menjelaskan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 79% dan tingkat ketidaksesuaiannya mencapai 21 % dengan menggunakan rumus Dean J. Champion. Adapun ketidaksesuaiannya karena dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP No. 02 PP No.71 Tahun 2010 pada Kantor Kepala Desa Amplas dikatakan baik.
6.	Variabel	Maya	Pengaruh	Kuantitatif	Dinas Energi dan Sumber

	Independen : Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah Variabel Dependen : Laporan Keuangan Daerah	Angelica (2019)	Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah		Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.
7.	Variabel Independen : PSAP No. 2 Variabel Dependen : Laporan Keuangan Daerah	Arifah Yuniarti (2019)	Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	Kualitatif	Penerapan LRA di Kabupaten Klaten hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02, hanya ada satu yang tidak sesuai yaitu transaksi dalam mata uang asing karena memang Kabupaten Klaten tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing.
8.	Variabel Independen : PSAP No.02	Riani Sulistianingsih (2020)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang	Kualitatif	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dilihat dari basis akuntansi, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip akuntansi dan

			Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)		pelaporan keuangan, pengakuan dalam penyajian LRA, pengukuran dalam penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No 71 Tahun 2010.
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis mengenai PSAP 02. Selain itu penelitian ini memiliki persamaan mengenai unit analisis yang digunakan berupa *organization*, yaitu sumber daya yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi badan. Divisi organisasi dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Selain memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian, periode pengamatan dan metode penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Bogor. Periode pengamatan pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada periode 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif *non statistic* untuk menganalisis mengenai apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan ketentuan PSAP 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, menganalisis bagaimana penerapan PSAP 02 dengan indikator pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran.

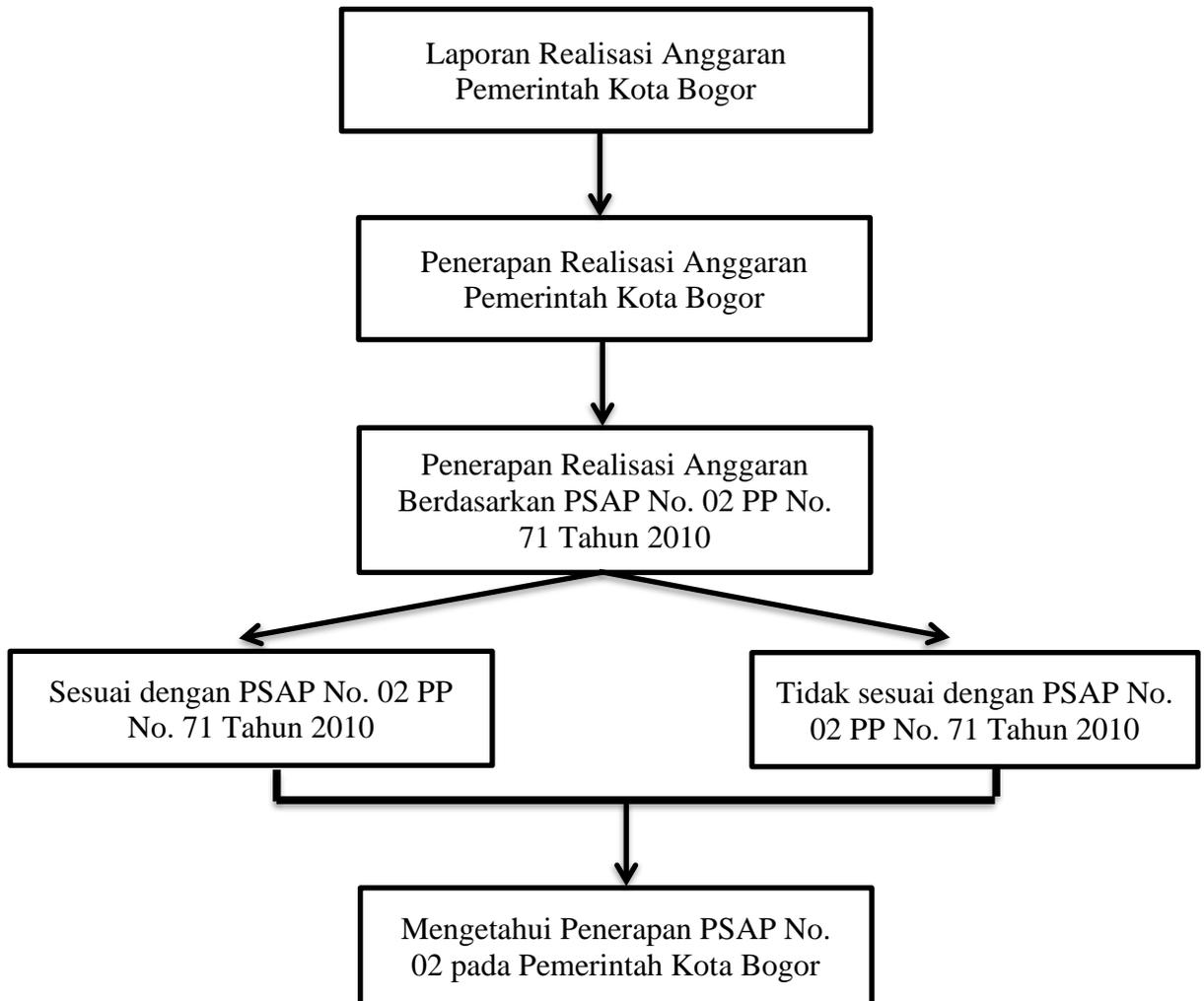
2.6.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan penelitian berdasarkan

pemaparan studi teoritik dan studi empirik. Gabungan antara studi teoritik dan empirik dalam penelitian ini menghasilkan variabel- variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan dari penjelasan teori diatas maka Laporan Realisasi Anggaran merupakan variabel yang sangat berperan penting dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah guna melihat kesesuaian pelaporan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif *ekploratif* dengan metode penelitian studi kasus mengenai analisis penerapan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasinya pada Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini dibuktikan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan kuantitatif non statistik. Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada dan masih terjadi sampai sekarang ataupun waktu yang berlalu. Jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

3. 2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel independen yaitu PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut pada Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Bogor.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan divisi organisasi, sehingga data yang digunakan berasal dari respons suatu organisasi tertentu. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2020 dengan menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat yang beralamat di Jl. Pemuda No. 31, RT.01/RW.06, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, dan website Badan Pusat Statistika yaitu www.jabar.bps.go.id.

3. 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif non statistik. Data kualitatif merupakan data berupa penjelasan dengan menggunakan

kata verbal yang tidak dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka sedangkan data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan dan bandingan berupa angka-angka yang diperoleh dari bagian penyedia data yang berupa angka-angka.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari unit analisis yang diteliti melalui hasil wawancara, observasi dan kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen yang telah diolah oleh perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder dalam bentuk data *time series* dari tahun 2018-2020 yang sudah diolah dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor. Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang dapat diakses di website : www.bkad.kotabogor.go.id atau www.kotabogor.go.id dan website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor www.jabar.bps.go.id.

3. 4. Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengamatan di dalam sebuah penelitian. Definisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya.

Table 3.1
Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan PSAP No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada
Pemerintah Kota Bogor Periode Tahun 2019 dan 2020

Variabel	Sub Variabel	Ukuran	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
PSAP 02 (Laporan Realisasi Anggaran)	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Menyusun dan menyajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010	Ordinal	1-7
	Pendapatan	Di akui ketika diterima dari rekening Kas Umum Daerah, SKPD, dan entitas lain atas nama BUD	Ordinal	8
		Di ukur ketika membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya		9
		Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran		10
		Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		11
	Belanja	Diakui ketika terjadinya pemasukan / pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah	Ordinal	12
		Di ukur berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran		13
		Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran		14
		Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		15
	Transfer	Di akui saat terjadinya	Ordinal	16

	penerimaan/pengeluaran di rekening Kas Umum Daerah		
	Di ukur ketika jumlah transfer yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah		17
	Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran		18
	Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		19
Surplus / Defisit	Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran	Ordinal	20
	Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		21
Pembiayaan	Di akui saat terjadinya penerimaan/pengeluaran di rekening Kas Umum Daerah	Ordinal	22
	Di ukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar		23
	Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran		24
	Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		25
Sisa Lebih / Kurang Anggaran Pembiayaan	Di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran	Ordinal	26
	Di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan		27
Transaksi Mata Uang Asing	Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Ordinal	28

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu metode *non probability sampling* dengan metode penarikan sampel *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang memiliki kriteria tertentu. Penarikan sampel ditentukan berdasarkan karakteristik sampel dan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pegawai yang bekerja merupakan Pegawai Negara Sipil (PNS).

Teknik pengukuran untuk mengolah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif yaitu menggunakan metode skala likert. Skala Likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal.

3. 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang bersifat terbuka mengenai topik tertentu, serangkaian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh responden untuk memperoleh data ataupun informasi di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang keuangan. Data yang dikumpulkan dari responden, kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.

2. Dokumentasi

melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan, seperti Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dan file yang tersedia disitus Badan Pusat Statistik www.jabar.bps.go.id kemudian dilakukan pengkajian serta penelaahan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari, meneliti, dan memahami berbagai macam literature sebagai penelitian terdahulu

(proposal penelitian ataupun jurnal), buku-buku, ketentuan peraturan akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. 7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni menjelaskan dengan kata-kata mengenai variabel penerapan PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Dimana data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan indikator pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan praktik atau fakta pada lokasi penelitian.

Jenis data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan jenis data *cross section*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada waktu yang sama atau periode tertentu. Data tersebut dapat berupa individu, perusahaan, daerah, dan lain-lain. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* / alat analisis SPSS versi 25 dan MS. Excel.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam hal ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan Laporan Realisasi Anggaran dan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor.

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan mengenai suatu objek yang diteliti. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk menggambarkan rata-rata, medium, modus, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jenis data penelitian. Teknik statistika deskriptif yang hanya untuk memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

3.7.3 Uji Kualitas Data

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat tergantung pada alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian ini diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.3.1 Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji seluruh item pertanyaan yang valid dan yang tidak valid. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik kolerasi *Pearson Product Moment*.

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kolerasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor. Hasil analisis kolerasi *bivariate* dengan melihat output *Pearson Correlation*. Kriteria pengujian apabila nilai *Pearson Correlation* $< r_{\text{tabel}}$ maka item pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *Pearson Correlation* $> r_{\text{tabel}}$ maka item pertanyaan dikatakan valid.

3.7.3.2 Uji Reliabilitas

Dalam bukunya, (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pernyataan dalam angket (kuesioner) penelitian. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik *Cronbach's Alpha*. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
2. Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kotamadya DT II Bogor dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1965 serta Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dengan luas wilayah administratif sebesar 2.156 ha, meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Tengah. Sejak tahun 1995, Kotamadya DT II Bogor mengalami perluasan wilayah menjadi 11.850 ha dan mengalami pemekaran menjadi enam kecamatan dengan penambahan satu kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Sareal. Senada dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah nama Kotamadya Bogor diubah menjadi Kota Bogor. secara administratif wilayah Kota Bogor berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Darmaga, dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Visi merupakan suatu rencana jangka panjang yang terwujud pada akhir periode. Dengan adanya visi maka rencana dan tujuan dalam membentuk dan membangun akan menjadi terarah sesuai dengan perencanaan, mempunyai berbagai fungsi diantaranya :

- a. Sebagai arah bagi semua kebijakan
- b. Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan
- d. Sebagai sasaran untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi Kota Bogor untuk jangka waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut **“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”**

Guna menjunjung visi perlu adanya misi sebagai rencana jangka pendek serta penjunjung dalam hal strategis untuk mencapai tujuan visi tersebut. Maka pemerintah Kota Bogor, memiliki Misi :

1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

Adapun program unggulan yang di miliki oleh pemerintah Kota Bogor yaitu :

1. Pembangunan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Penguatan Spiritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

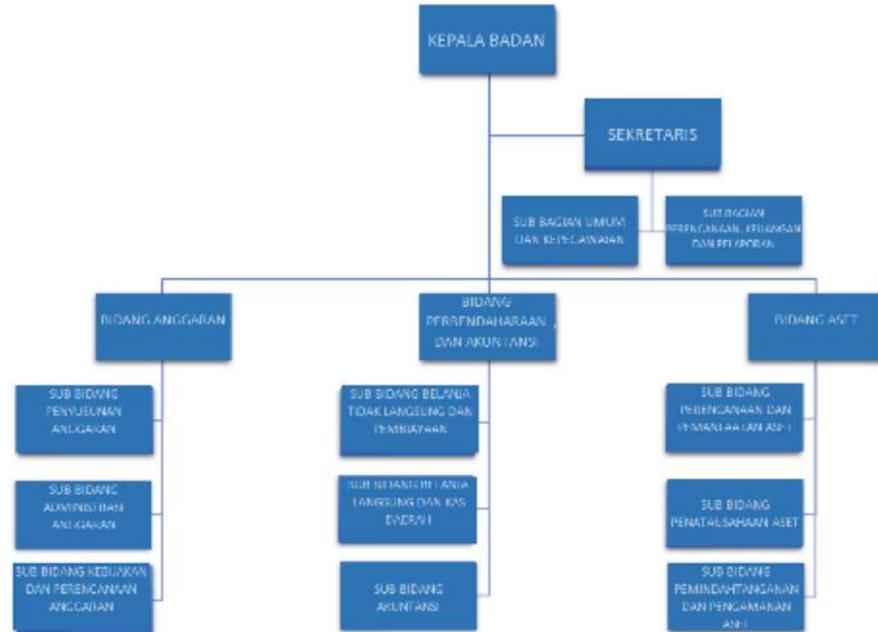
4.1.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah yang mempunyai tugas Bupati dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Bogor. BKAD Kota Bogor dalam Perencanaan Strategis Tahun 2019-2024 mempunyai tujuan : “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel”.

4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor



Sumber : BKAD Kota Bogor, 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor di atas, maka dapat diuraikan mengenai tugas-tugas dari setiap bagian/jabatan, yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah. Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kesekretariatan. Fungsi Sekretariat yaitu :

- a. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan perumusan rencana kerja serta rencana kerja anggaran badan;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumah tanggaan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan kesekretariatan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Pelaksanaan administrasi umum, pembinaan dan administrasi kepegawaian
- Pelaksanaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkup Badan;
- Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- Penyusunan konsep rencana kerja dan rencana kerja anggaran Badan;
- Pelaksanaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- Penyusunan konsep laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Badan;
- Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

3. Bidang Anggaran

Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan konsep kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- b. Pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Anggaran;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;

2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

3) Sub Bidang Administrasi Anggaran

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Administrasi Anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan konsep kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- b. Pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

1) Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah.

2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

3) Sub Bidang Akuntansi

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Akuntansi;
- Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Akuntansi;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Akuntansi;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Akuntansi.

5. Bidang Aset

Untuk melaksanakan Bidang Aset mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan konsep kebijakan teknis di Bidang Aset;
- b. Pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Aset;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Aset;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Aset;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 - Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset.
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Penatausahaan Aset.
 - 3) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - Pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara professional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup badan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- e. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
- f. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- g. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Pemerintahan Kota Bogor telah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran dan juga dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun sebelumnya.

Di dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Begitupun dengan pemerintahan Kota Bogor telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sekali dalam satu tahun. Didalam PSAP No. 02 menyebutkan kalau Laporan Realisasi Anggaran disajikan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya Pemerintahan Kota Bogor telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP No. 02.

4.2.1.2 Analisis Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Berdasarkan PSAP No. 02, pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. di Kota Bogor semua pendapatan diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan

semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pengakuan pendapatan di Pemerintah Kota Bogor diakui ketika hak atas pendapatan itu sudah ada. Misalnya untuk pajak, jika SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sudah terbit maka bisa diakui sebagai pendapatan dan setiap transaksi dari Rekening Kas Umum Daerah akan langsung dicatat ke dalam jurnal. Pencatatan jurnalnya dengan menginput data ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) keuangan versi akrual. Pelaporan Pemerintah Kota Bogor menggunakan akuntansi berbasis akrual, sehingga pendapatan diakui ketika terjadinya suatu transaksi.

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Pendapatan Daerah	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	741.531.123.201,00	872.017.242.152,12	117,60	1.015.884.216.919,86
Pendapatan Transfer	1.453.467.644.604,00	1.415.498.666.396,00	97,39	1.455.644.350.874,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	83,99	88.328.640.000,00
Jumlah	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	102,78	2.559.857.207.793,86

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.428.579.503.649,12 atau 102,78% dari target pendapatan. Namun, realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp131.277.704.144,74 atau 5,12% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.559.857.207.793,86.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp872.017.242.152,12 atau 117,60% dari anggaran sebesar Rp 741.531.123.201,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp143.866.974.767,74 atau 13,15% dibandingkan tahun 2019 sebesar

Rp1.015.884.216.919,86.

Penurunan anggaran ditahun 2020 disebabkan karena adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperlihatkan perkiraan asumsi makro seperti perusahaan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang bersasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.415.498.666.396,00 atau 97,39% dari anggaran sebesar Rp1.453.476.644.604,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp40.145.684.478,00 atau 2,76% dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.455.644.350.874,00.

Penurunan Pendapatan Transfer disebabkan karena adanya penyesuaian target untuk penanganan covid-19. Penyesuaian target pendapatan daerah melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah yang berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah. Realisasi Lain0lain Pendapatan yang Sah tahun 2020 sebesar Rp141.063.595.101,00 atau 83,99% dari target anggaran sebesar Rp167.951.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp52.734.955.101,00 atau 59,70% dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp88.328.640.000.

Dalam hal ini penurunan pendapatan diakibatkan karena terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal 2020, yang melahirkan perubahan

kebijakan di target nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut. Perubahan keuangan daerah Kota Bogor terjadi dikarenakan adanya penyesuaian terhadap target penerimaan pendapatan daerah yaitu komponen penerimaan PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2.1.3 Analisis Akuntansi Belanja Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Kebijakan akuntansi untuk belanja daerah Kota Bogor menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor menggunakan basis akrual sehingga belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban atau saat diperoleh manfaat. Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah, belanja yang diukur dengan menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

Tabel 4.2

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Belanja Daerah	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.175.216.112.217,19	1.951.301.711.023,00	89,71	2.025.462.086.541,19
Belanja Modal	307.168.807.801,00	276.157.283.029,00	89,90	501.033.407.778,00
Belanja Tak Terduga	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	79,60	9.455.600,00
Jumlah	2.641.028.498.058,19	2.353.736.171.982,00	89,12	2.524.504.949.919,19

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.353.736.171.982,00 atau 89,12% dari anggaran sebesar Rp2.641.028.498.058,19 dan mengalami penurunan sebesar

Rp170.768.777.937,19 atau 6,76% dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.524.504.949.919,19.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.951.301.711.023,00 atau 89,71% dari target anggaran sebesar Rp2.175.216.112.217,19 dan mengalami penurunan sebesar Rp74.160.375.518,19 atau 3.66% dari realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.025.462.086.541,19.

2. Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp276.157.283.029,00 atau 89,90% dari target anggaran sebesar Rp307.168.807.801,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp224.876.124.749,99 atau 44,88% dari realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp501.033.407.778,00.

3. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2020 sebesar Rp126.277.177.930,00 atau 79,60% dari target anggaran sebesar Rp158.643.578.040,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp126.267722.330,00 dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 9.455.600,00.

Peurunan realisasi Belanja Daerah disebabkan karena adanya penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dari DBHCHT, dan disebabkan karena refocusing dan realokasi belanja daerah untuk melaksanakan program percepatan penanganan pandemi covid-19. Kenaikan realisasi anggaran karena sebagian besar Belanja Tak Terduga digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp126.239.877.930,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atas nama Ine Wulansari sesuai keputusan Walikota sebesar

Rp37.300.000,00.

Belanja Kota Bogor diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi jika terbit dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D. Untuk pengukurannya berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Berdasarkan data realisasi belanja tahun anggaran 2020 yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

4.2.1.4 Analisis Akuntansi Transfer Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota Bogor, Transfer dibedakan menjadi dua yaitu ; Transfer masuk dan Transfer Keluar. Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan Transfer Keluar adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2020 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Tabel 4.3

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Transfer Daerah	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	100,00	1.995.853.019,00
Jumlah	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	100,00	1.995.853.019,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggran Pemerintah Kota Bogor

Realisasi Transfer tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.134.531.000,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp1.134.531.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp861.322.019,00 atau 43,16% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.995.853.019,00.

Di tahun anggaran 2020 Kota Bogor tidak menganggarkan ataupun merealisasikan Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa karena anggaran Kota Bogor dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dengan memaksimalkan pada bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala. Meskipun tidak di anggarkan transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa tetap dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transfer Daerah direalisasikan pada transfer bantuan keuangan ke Kabupaten sebesar Rp1.134.531.000,00.

Berdasarkan data realisasi belanja tahun anggaran 2020 yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

4.2.1.5 Analisis Akuntansi Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang pendapatan dibawah belanja.

Tabel 4.4

Realisasi Surplus/Defisit Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Surplus/Defisit Anggaran	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	102,78	2.559.857.207.793,86
b. Belanja dan Transfer Daerah	2.641.028.498.058,19	2.353.736.171.982,00	89,12	2.524.504.949.919,19
Surplus/Defisit anggaran a-b	(278.069.230.253,19)	74.843.331.667,12	(13,66)	35.352.257.874,67

Sumber : Laporan Realisasi Anggran Pemerintah Kota Bogor

Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2020 menunjukkan surplus sebesar Rp74.843.331.667,12 dari anggaran defisit sebesar Rp(278.069.230.253,19).

4.2.1.6 Analisis Akuntansi Pembiayaan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (neto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran.

Tabel 4.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Pembiayaan Daerah	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penerimaan Pembiayaan	388.159.958.113,19	334.337.716.975,19	86,13	401.802.129.830,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	108.956.196.860,00	80.545.341.402,00	73,92	155.496.608.833,00
Pembiayaan Neto : a-b	279.203.761.253,19	253.792.375.573,19	90,90	246.305.608.833,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor

Selisih antara realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2020 menunjukkan nilai yang positif (surplus) sebesar Rp253.792.375.573,19 atau 90.90% dari anggarannya sebesar Rp279.203.761.253,19.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, dan penerimaan piutang daerah yang realisasinya sebesar Rp 334.337.716.975,19 atau 86,13% dari anggaran sebesar Rp388.159.958.113,19.

- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp277.640.687.080,19
- b. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank pada RSUD – BLUD sebesar

Rp32.159.096.032,00

- c. Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah sebesar Rp5.484.766.176,00 yang merupakan pengembalian pinjaman dari PDAM
- d. Penerimaan kembali piutang pajak daerah sebesar Rp19.053.167.687,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2020 sebesar Rp80.545.341.402,00 atau 73,92% dari anggarannya sebesar Rp108.956.196.860,00. Jumlah tersebut meliputi :

- a. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp24.300.000.000,00
- b. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp56.245.341.402,00. Realisasi tersebut terdiri dari : penerusan pinjaman PDAM sebesar Rp5.484.766.176,00 dan Pembayaran Pokok Utang BLUD sebesar Rp50.760.575.226.

3. Pembiayaan Neto

Dalam PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Di Pemerintah Kota Bogor juga menyajikan pembiayaan neto yang diperoleh dari selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 253.792.375.573,19.

Di dalam PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Umum Negara/Daerah. Di Kota Bogor setiap adanya penerimaan pembiayaan akan dicatat oleh bendahara penerimaan dan uangnya langsung masuk ke RKUD. Sama dengan penerimaan, pengeluaran pembiayaan juga akan dicatat oleh bendahara pengeluaran dengan syarat mengajukan terlebih dahulu ke sekretariat BKAD kemudian perbendaharaan akan mengeluarkan SP2D. hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam PSAP Nomor 02 yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

4.2.1.7 Analisis Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus/defisit anggaran.

Tabel 4.6

Realisasi APBD SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Perhitungan APBD	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus/Defisit	(279.203.761.253,19)	73.708.800.667,12	(26,40)	31.356.404.855,67
b. Pembiayaan Netto	279.203.761.253,19	253.792.375.573,19	90,90	246.305.520.997,52
SiLPA/SiKPA : a+b	0,00	327.501.176.240,31	0,00	277.662925.853,19

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Dilihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Bogor relatif cukup tinggi disaat pandemi Covid-19 yang seharusnya anggaran tersebut bisa disalurkan untuk berbagai program sebagai penunjang berjalannya pembangunan dan perputaran roda ekonomi, SiLPA mencapai Rp327.501.176.240,31 atau naik 15% dibandingkan dengan tahun anggaran 2019. Tingginya SiLPA disebabkan karena adanya keterlambatan dalam aturan teknis pemerintah pusat terkait pelaksanaan DAU dan DAK, sehingga pencapaian realisasi pendapatan daerah yang telah disesuaikan melebihi target dan efisiensi belanja transfer pemerintah pusat. Sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, dan dana tidak terserap secara maksimal.

4.2.1.8 Analisis Transaksi Dalam Mata Uang Asing Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

Dalam PSAP Nomoe 2 paragraf 64 bahwa transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi. Akan tetapi selama tahun anggaran 2020 maupun tahun sebelumnya Pemerintah Kota Bogor tidak pernah melakukan transaksi dengan mata uang asing. Namun, jika terdapat transaksi mata uang asing tersebut, maka akan di konversikan terlebih dahulu kedalam rupiah.

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya. Dalam hal ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran melalui kuesioner yang selanjutnya diberikan kepada pegawai BKAD Kota Bogor sebagai responden.

Menurut Sugiyono (2016) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai nilai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif

Tabel 4.7

Skor Nilai Rata-Rata

Interval	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : *Sugiono 2016 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-19. Bandung : Alfabeta.*

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner berupa *link google form* dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. proses penyebaran hingga pengumpulan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 - 30 Mei 2022. Dari total 44 pegawai keseluruhan, kuesioner diisi oleh 30 pegawai, tidak terdapat kuesioner yang cacat yang diolah oleh penulis. Adapun rincian penyebaran kuesioner tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Pengumpulan Data

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Keseluruhan Pegawai	44	100%
2.	Pegawai yang mengisi kuesioner	30	86%
3.	Kuesioner yang dapat diolah	30	86%

Sumber : Data Primer, 2022

Responden terdiri dari kepala sub-bagian, kepala sub-bidang dan staff yang menjadi analisis penelitian. Selanjutnya, sebanyak 30 kuesioner yang di isi oleh responden, dan dapat dipergunakan dalam pengolahan data.

Tabel 4.9
Hasil Jawaban Kuesioner mengenai Penerapan PSAP Nomor 02

Jawaban Responden	Bobot	STS	TS	N	S	SS	Total	%	Kriteria
		1	2	3	4	5			
Pernyataan 1	F	0	0	0	3	27	30	4,90	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	12	135	147		
Pernyataan 2	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 3	F	0	0	0	6	24	30	4,80	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	24	120	144		
Pernyataan 4	F	0	0	0	11	19	30	4,63	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	44	95	139		
Pernyataan 5	F	0	0	0	18	12	30	4,40	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	72	60	132		
Pernyataan 6	F	0	0	0	15	15	30	4,50	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	60	75	135		
Pernyataan 7	F	0	0	0	10	20	30	4,67	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	40	100	140		

Pernyataan 8	F	0	0	0	8	22	30	4,73	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	32	110	142		
Pernyataan 9	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 10	F	0	0	0	11	19	30	4,63	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	44	95	139		
Pernyataan 11	F	0	0	0	14	16	30	4,53	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	56	80	136		
Pernyataan 12	F	0	0	0	10	20	30	4,67	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	40	100	140		
Pernyataan 13	F	0	0	0	8	22	30	4,73	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	32	110	142		
Pernyataan 14	F	0	0	0	11	19	30	4,63	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	44	95	139		
Pernyataan 15	F	0	0	0	7	23	30	4,77	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	28	115	143		
Pernyataan 16	F	0	0	0	4	26	30	4,87	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	16	130	146		
Pernyataan 17	F	0	0	0	11	19	30	4,63	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	44	95	139		
Pernyataan 18	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 19	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 20	F	0	0	0	11	19	30	4,63	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	44	95	139		
Pernyataan 21	F	0	0	0	12	18	30	4,60	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	48	90	138		
Pernyataan 22	F	0	0	0	10	20	30	4,67	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	40	100	140		
Pernyataan 23	F	0	0	0	16	14	30	4,47	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	64	70	134		
Pernyataan 24	F	0	0	0	7	21	28	4,75	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	28	105	133		
Pernyataan 25	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 26	F	0	0	0	8	22	30	4,73	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	32	110	142		
Pernyataan 27	F	0	0	0	9	21	30	4,70	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	36	105	141		
Pernyataan 28	F	0	0	0	12	18	30	4,60	Sangat Tinggi
	Skor	0	0	0	48	90	138		
Rata-rata keseluruhan								4,67	Sangat Tinggi

Sumber : Olah data primer dengan MS. Excel

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, penerapan PSAP Nomor 02 di Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarakan secara online melalui *google formulir* kepada pegawai BKAD Kota Bogor. Dari segi penerapan PSAP pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki 8 (delapan) indikator yaitu Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran memiliki 7 (tujuh) item pernyataan, Pendapatan memiliki 4 (empat) item pernyataan, Belanja memiliki 4 (empat) item pernyataan, Transfer memiliki 4 (empat) item pernyataan, Surplus/Defisit memiliki 2 (dua) item pernyataan, Pembiayaan memiliki 4 (empat) item pernyataan, Sisa Lebih/Kurang Anggaran Pembiayaan memiliki 2 (dua) item pernyataan dan transaksi mata uang asing memiliki 1 (satu) item pernyataan.

Persepsi responden terhadap indikator mengenai penerapan PSAP Nomor 02 memiliki skor rata-rata keseluruhan 4,67 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5,00, hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa variabel penerapan PSAP Nomor 02 dinilai sangat baik dan telah diterapkan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor cukup baik secara keseluruhan dari segi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, SiLPA/SiKPA.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian memerlukan uji kualitas data untuk membuktikan baik atau tidaknya suatu data yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis uji kualitas data, yaitu :

4.2.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Untuk mengukur tingkat validitas suatu pernyataan pada kuesioner tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)=n-2 dan $\alpha=0,05$. Dalam penelitian ini terdapat 100sampel (n), maka $df=30-2=28$, sehingga r_{tabel} yang digunakan adalah 0,3610. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid, sedangkan apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak valid.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan (X)	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Penyusunan LRA	1	0,374	0,361	Valid
	2	0,397	0,361	Valid
	3	0,519	0,361	Valid
	4	0,566	0,361	Valid
	5	0,477	0,361	Valid
	6	0,563	0,361	Valid
	7	0,597	0,361	Valid
Pendapatan	8	0,479	0,361	Valid
	9	0,676	0,361	Valid
	10	0,766	0,361	Valid
	11	0,675	0,361	Valid
Belanja	12	0,591	0,361	Valid
	13	0,658	0,361	Valid
	14	0,565	0,361	Valid
	15	0,556	0,361	Valid
Transfer	16	0,518	0,361	Valid
	17	0,776	0,361	Valid
	18	0,784	0,361	Valid
Surplus/Defisit	19	0,630	0,361	Valid
	20	0,508	0,361	Valid
	21	0,654	0,361	Valid
Pembiayaan	22	0,699	0,361	Valid
	23	0,753	0,361	Valid
	24	0,725	0,361	Valid
SiLPA/SiKPA	25	0,623	0,361	Valid
	26	0,714	0,361	Valid
	27	0,775	0,361	Valid
Transaksi Mata Uang Asing	28	1.000	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, olah data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, SiLPA/SiKPA, dan transaksi mata uang asing memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dimana r_{tabel} 0,361 dengan nilai taraf signifikansi sebesar 5%.

4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban dari responden mengenai pernyataan tersebut adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil dengan menggunakan metode *Alpha Cornbach's*. apabila jawaban dari item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *Alpha Cornbach's* $>0,60$ maka pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan *reliable* atau memiliki keandalan, sedangkan jika nilai *Alpha Cornbach's* $<0,60$, maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak *reliable* atau tidak memiliki keandalan

Tabel 4.11
Nilai Cronbach's Alpha

	Reliability Statistics		
	Cronbach's Alpha	of Items	Keterangan
Penyajian LRA	0,476	7	Reliabel
Pendapatan	0,594	4	Reliabel
Belanja	0,381	4	Reliabel
Transfer	0,488	3	Reliabel
Surplus/Defisit	0,096	3	Reliabel
Pembiayaan	0,547	3	Reliabel
SiLPA/SiKPA	0,492	3	Reliabel
Transaksi dalam mata uang asing	1.000	1	Reliabel

Sumber : Data primer, olah data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut stabil dan konsisten sehingga dapat dikatakan *reliable* atau handal karena memiliki nilai *Cornbach's Alpha* $>0,60$.

4.3. Pembahasan

Hasil pengujian pada penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang bertujuan untuk menguji kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, dan menguji bagaimana perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Adapun hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan membandingkan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yaitu periode Realisasi 2019 (*Audited*) dan Realisasi (*Audited*) serta anggaran 2020. Perbandingan anggaran dan Realisasi tahun anggaran 2019 dan 2020 yaitu :
 - a. Realisasi pendapatan Kota Bogor pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 5,12% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang disebabkan adanya penyesuaian target PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat serta penyesuaian dalam percepatan penanganan covid-19.
 - b. Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor juga mengalami penurunan sebesar 6,76% dibandingkan realisasi tahun 2019, penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor, dan refocusing serta realokasi belanja daerah dalam rangka melaksanakan program percepatan penanganan covid-19. Belanja penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
 - c. Kota Bogor tidak menganggarkan ataupun merealisasikan transfer bagi hasil ke kab/kota/desa karena anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19, sedangkan transfer bantuan keuangan direalisasikan ke kabupaten sesuai dengan anggaran tahun 2020.
 - d. Penerimaan pembiayaan tahun 2020 cukup tinggi yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya, pinjaman dalam negeri, dan penerimaan piutang, sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya digunakan sekitar 4,15% dari penerimaan pembiayaan. Sehingga pembiayaan neto mencapai nilai yang tinggi sebesar Rp253.792.375,19

- e. Pada akhir Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Jika dilihat Kota Bogor memiliki (SiLPA) relatif tinggi yaitu sebesar Rp 327.501.176.240,31. Tingginya SiLPA disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam pelaksanaan DAU dan DAK sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan melebihi target dan efisiensi belanja transfer pemerintah pusat tidak memungkinkan waktu pelaksanaannya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya penggunaan instrumen APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pemberian layanan publik yang baik.
 - f. Jika dilihat pada PSAP Nomor 02 paragraf 64 bahwa transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi. Akan tetapi Pemerintah Kota Bogor tidak melakukan pembukuan mata uang asing ke dalam rupiah, bukan berarti Kota Bogor tidak mengikuti standar yang berlaku, namun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020 tidak terjadi transaksi dalam mata uang asing.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS pada hasil statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari perhitungan statistik deskriptif menunjukkan rata-rata sebesar 4,67%, jika dilihat dari skor rata-rata dalam perhitungan skala likert mengindikasikan kriteria yang sangat tinggi/sangat baik. Hasil uji validitas untuk 30 pernyataan responden sebagai sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, berdasarkan nilai r_{tabel} N28 ($df = 30-2$) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,3610 sedangkan untuk taraf signifikan 1% diperoleh r_{tabel} sebesar 0,3061. Hasil dari uji reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* (α) item untuk setiap variabel yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60 sehingga item untuk variabel adalah reliabel.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - a. Pemerintah Kota Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada akhir periode, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
 - b. Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil dari jawaban kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan, dan melaporkan Laporan Keuangan tepat pada waktunya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Sehingga BPK memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Kota Bogor. Predikat WTP tersebut tanpa paragraph penjelasan yang membuktikan bahwa Laporan Keuangan Kota Bogor tidak ada keraguan atau kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 4.12

**Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Dengan PSAP Nomor 02**

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor	Keterangan
Laporan Realisasi Anggaran			
Penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan	PSAP No. 02 paragraf 8 LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Sesuai
Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan	PSAP No. 02 paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut : a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan, dan e. Satuan angka yang digunakan.	Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut : f. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; g. Cakupan entitas pelaporan; h. Periode yang dicakup; i. Mata uang pelaporan, dan Satuan angka yang digunakan.	Sesuai
Periode pelaporan	PSAP No. 02 paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	PSAP No. 02 paragraf 11 entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Entitas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Sesuai
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan –LRA b. Belanja	Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : h. Pendapatan –LRA i. Belanja j. Transfer	Sesuai

	<p>c. Transfer</p> <p>d. Surplus/defisit-LRA</p> <p>e. Penerimaan pembiayaan</p> <p>f. Pengeluaran pembiayaan</p> <p>g. Pembiayaan neto</p> <p>Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)</p>	<p>k. Surplus/defisit-LRA</p> <p>l. Penerimaan pembiayaan</p> <p>m. Pengeluaran pembiayaan</p> <p>n. Pembiayaan neto</p> <p>o. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)</p>	
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	<p>PSAP No. 02 paragraf 19-20 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.</p>	<p>Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.</p>	Sesuai
AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA			
Pengakuan	<p>PSAP No. 02 paragraf 21-22 pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan</p>	<p>Pendapatan – LRA Pemerintah Kota Bogor diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan</p>	Sesuai
Pengukuran	<p>PSAP No. 02 paragraf 24 akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)</p>	<p>Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)</p>	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	<p>PSAP No. 02 paragraf 30 akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah</p>	<p>Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	Sesuai
AKUNTANSI BELANJA			
Pengakuan	<p>PSAP No. 02 paragraf 31-32 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran</p>	<p>Dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran</p>	Sesuai

	pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU (Ganti Uang Persediaan)	
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 44 realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	PSAP No. 02 paragraf 34 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.	Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai Dengan Klasifikasi Ekonomi, Yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai
Penyajian belanja modal	PSAP No. 02 paragraf 36 belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.	Belanja operasi diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sifat dari belanja operasi di pemerintah Kota Bogor sifatnya memberikan manfaat jangka pendek	Sesuai
Penyajian belanja tak terduga	PSAP No. 02 paragraf 38 belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.	Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Belanja Tak Terduga dianggarkan dan direalisasikan untuk pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atas nama Ine Wulansari dan digunakan untuk penanganan Covid-19	Sesuai
AKUNTANSI TRANSFER			
Penyajian transfer masuk	PSAP No. 02 paragraf 23 transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya	Pemerintah Kota Bogor mengelompokkan pendapatan transfer meliputi :	Sesuai

	penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) b. Dana Bagi Hasil Pajak c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam d. Dana Alokasi Umum e. Dana Alokasi Khusus f. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya g. Transfer Pemerintah Provinsi 	
Penyajian transfer keluar	PSAP No. 02 paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.	Transfer keluar yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah transfer bagi hasil namun tidak dianggarkan. Serta transfer bantuan keuangan yang meliputi transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya.	Sesuai
AKUNTANSI SURPLUS / DEFISIT			
Penyajian surplus/defisit - LRA	PSAP No. 02 paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.	Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.	Sesuai
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Definisi	PSAP No. 02 paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.	Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor berasal dari penggunaan SiLPA/SiKPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali piutang daerah	Sesuai
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan akuntansi di peraturan Wali Kota Bogor menjelaskan bahwa Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum	Sesuai

		Negara/Daerah.	
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Dalam kebijakan akuntansi di peraturan Wali Kota Bogor menjelaskan bahwa akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Sesuai
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Definisi	PSAP No. 02 paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.	Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor meliputi pengeluaran untuk Penyertaan Modal dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Sesuai
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan di peraturan Pemerintah Kota Bogor menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD	Sesuai
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO			
Penyajian pembiayaan neto	PSAP No. 02 paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto	Pemerintah Kota Bogor mencatat selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto	Sesuai
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN			
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 61 selisih	Pemerintah Kota Bogor mencatat	Sesuai

SiLPA/SiKPA	lebih/kurang realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA.	selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING			
Penyajian dan pengungkapan	PSAP No. 02 paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.	Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2020	Tidak Ada Kegiatan

Sumber : Data Diolah, 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2019 dan 2020. Ditambah dengan teori-teori dasar yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan informasi pos-pos Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang dibandingkan dengan anggarannya berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam PSAP Nomor 02. Hanya saja Pemerintah Kota Bogor tidak melakukan transaksi mata uang asing karena Pemerintah Kota Bogor tidak pernah melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Periode pelaporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan kurun waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dalam hal penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2016 telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut hingga saat ini.
2. Pemerintah Kota Bogor melahirkan perubahan kebijakan melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2019. Hal ini menjadikan rencana belanja seperti program pembangunan infrastruktur mengalami penundaan bahkan pembatalan pembangunan. Namun, realisasi pendapatan yang telah disesuaikan melampaui target pendapatan, dengan penambahan anggaran SiLPA tahun sebelumnya mengakibatkan SiLPA tahun 2020 relatif cukup tinggi yaitu naik sekitar 15% dibandingkan tahun 2019. Dengan adanya pandemi covid-19 seharusnya anggaran tersebut dapat direalisasikan dalam berbagai program di bidang

kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial untuk menunjang berjalannya pembangunan guna perputaran ekonomi Kota Bogor. Namun banyak program kegiatan yang tertunda karena perencanaan yang kurang matang Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa program kerja Kota Bogor tidak berjalan secara optimal dan dana yang tidak terserap secara maksimal.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis ingin mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi, yaitu sebagai berikut :

1. Informasi mengenai laporan keuangan sebaiknya dipublikasikan dengan diperbaharui secara intens pada website resmi Pemerintah Kota Bogor agar lebih transparan supaya mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang anggaran dan realisasi entitas pelaporan. Serta mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggaran.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) relatif tinggi, sebaiknya lebih dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan perlindungan sosial. Sehingga APBD Kota Bogor menjadi lebih baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terasa realisasinya, dimana dana yang diserap secara maksimal menghasilkan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuniarti, A (2019). Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi. IAIN Surakarta.
- Paidi (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan.
- Irawan, M. (2016). Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN :2337-5663. Volume :4, Nomor : 2.
- Sandaya, N. (2018). Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Santie, E. (2015) Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energy Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.3 No.2 Juni 2015*, Hal. 853-862.
- Stefani, I. (2014). Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Riani Sulistianingsih (2020). Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan). *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 23 No. 3/2020.
- Budi S Purnomo (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi dan*

Keuangan, 6 (3), 467-476.

Pratiwi, Y. (2013) Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Penerapan PSAP No. 02 Menurut PP No.24 Tahun 2005). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I, 2020, BPK RI.
<https://www.bpk.go.id/> [Diakses pada tanggal 18 September 2021]

Jamaluddin Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa-Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Bastian, Indra. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan (2017). Pedoman Penulisan Skripsi.

<https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/> [Diakses pada tanggal 10 Mei 2021]

<https://kotabogor.go.id/>

<https://bkad.kotabogor.go.id/index.php/welcome/profil>

[Pengertian Skala Likert dan Contoh Cara Hitung Kuesionernya - diedit.com](https://diedit.com) [Diakses pada tanggal 24 Desember 2021]

<http://bpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Lampiran-19-KEBIJAKAN-AKUNTANSI-TRANSFER.pdf> [Diakses pada tanggal 28 Desember 2021]

<https://sobatmateri.com/8-faktor-penentu-besarnya-apbd/?amp> [Diakses pada tanggal 5 Januari 2022]

sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor*

Peraturan Walikota Bogor Nomor 84 Tahun 2016 Tentang *Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor [Diakses pada tanggal 24 April 2022]

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 69 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor* [Diakses pada tanggal 10 Mei 2022]

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/27/19413171/pemulihan-ekonomi-pemkot-bogor-ajukan-pinjaman-rp-205-triliun?page=all#page2> [Diakses pada tanggal 8 Juni 2022]

<https://regional.kontan.co.id/news/soal-rencana-pinjaman-pen-daerah-ini-kata-pemkot-bogor> [Diakses pada tanggal 8 Juni 2022]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danika Septhi Moranie
Alamat : Jl. Parung Banteng Rt 003/Rw 001, Kel. Katulampa,
Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 24 September 1999
Agama : Islam
Nomor Handphone : 0813-8310-1270
Email : danika.septhi354@gmail.com
Pendidikan :

- SD : SDN 2 Jatisrono
- SMP : SMP PGRI 15 Kota Bogor
- SMK : SMK Pembangunan Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, 2022
Penulis,

Danika Septhi Moranie

Lampiran 1
Surat Permohonan Riset/Penelitian



Universitas Pakuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 705 /WD.1/FEB-UP/VIII/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

31 Agustus 2021

Kepada : Yth. Pimpinan
KANTOR BKAD KOTA BOGOR
Jl. Pemuda No. 31, Kel. Tanah Sareal
Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat 16162.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Danika Septhi Moranie
NPM : 022117217
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BOGOR

Jl. Pemuda No.31 Lt. 2 - 3 Kel. Tanah Sereal Kec. Tanah Sereal, Kota
Bogor 16162

Telp. 0251-8323099 . Email : bkad@kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN DITERIMA RISET/PENELITIAN

No. 827.14/1295-BKAD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evandy Dahni, S.H.,M.H.
Jabatan : Sekertaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

Menindaklanjuti surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor nomor 070/ -Kesbangpol tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan surat dari Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor 705/WD.1/FEB-UP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Riset/Penelitian/Magang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Danika Septhi Moraine
Status : Mahasiswa
NPM : 022117217
Instansi : Universitas Pakuan
Jurusan : Akuntansi

Telah diterima sebagai peserta untuk melakukan kegiatan riset/penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 06 September 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sekretaris

Evandy Dahni, S.H., M.H.

Pembina

197403152005011009



Catatan :
✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Lampiran 2
Bukti Persetujuan Telah Diseminarkan

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PADA PEMERINTAHAN KOTA BOGOR PERIODE 2019
DAN 2020**

Proposal Penelitian
Telah diseminarkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, 04 Januari 2022
Danika Septhi Moranie
022117217

Disetujui

Dosen Penguji
(Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP., CFA.,
CNPHRP., CAP)

Ketua Komisi Pembimbing
(Monang Situmorang, Ak.,MM.,CA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edi Suroho, Drs., M.M)



Diketahui

Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,C.A.,CSEP.,
QIA., CFE., CGCAE



Disetujui oleh Dosen Penguji :

Revisi Proposal Penelitian
Danika Kotak Masuk x

 **Danika Septhi** 12 Jan 2022 10.04 (2 hari yang lalu) ☆
Assalamualaikum, wr. wb selamat siang pak Agung saya Danika Sept...

 **Agung Fajar Il.** 12 Jan 2022 17.09 (2 hari yang lalu) ☆ ↶ ⋮
kepada saya ▾
ok lanjut

↶ Balas ➡ Teruskan

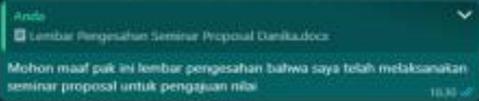
Disetujui oleh Ketua Komisi :

 Pak Monang DOSPEM

 Lembar Pengesahan Seminar Pr...
DOCX - 31 KB 09:30 ✓

Selamat pagi pak, untuk revisi proposal penelitian sudah di approved oleh pak agung dan di persiapkan lanjut ke bab selanjutnya, untuk itu saya ingin meminta tanda tangan bapak di lembar pengesahan saya pak. 09:30 ✓

Ntar saja...lanjut saja ke bab 4 dan 5 ya. 10:09

 Anda
Lembar Pengesahan Seminar Proposal Danika.docx
Mohon maaf pak ini lembar pengesahan bahwa saya telah melaksanakan seminar proposal untuk pengajuan nilai. 10:30 ✓

Nhga usah...lanjut saja bab 4 dan 5. 10:31

Untuk pengajuan nilai seminar saya bagaimana pak? 10:32 ✓

Dari ang komisi saya ya... 10:43

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741,531,123,201.00	872,017,242,152.12	117.60	1,015,884,216,919.86
3	Pendapatan Pajak Daerah	440,000,000,000.00	509,039,468,746.00	115.69	689,543,006,040.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36,691,027,400.00	35,010,375,259.00	95.42	51,362,153,192.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,520,905,570.00	31,927,293,792.00	95.25	28,241,844,911.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	231,319,190,231.00	296,040,104,355.12	127.98	246,737,212,776.86
7	PENDAPATAN TRANSFER	1,453,476,644,604.00	1,415,498,666,396.00	97.39	1,455,644,350,874.00
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,086,295,148,560.00	1,083,171,964,899.00	99.71	1,106,494,405,814.00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	74,511,394,093.00	86,344,563,026.00	115.88	53,495,246,384.00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40,430,777,107.00	38,670,158,675.00	95.65	24,159,177,895.00
11	Dana Alokasi Umum	769,048,963,000.00	762,556,115,000.00	99.16	838,948,449,000.00
12	Dana Alokasi Khusus	202,304,014,360.00	195,601,128,198.00	96.69	189,891,532,535.00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28,928,586,000.00	28,928,586,000.00	100.00	41,073,011,000.00
14	Dana Penyesuaian	28,928,586,000.00	28,928,586,000.00	100.00	41,073,011,000.00
15	Transfer Pemerintah Provinsi	255,593,262,838.00	222,967,276,647.00	87.24	252,139,954,160.00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	255,593,262,838.00	222,967,276,647.00	87.24	252,139,954,160.00
17	Bantuan Keuangan	82,659,647,206.00	80,430,838,850.00	97.30	55,936,979,900.00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167,951,500,000.00	141,063,595,101.00	83.99	88,328,640,000.00
19	Pendapatan Hibah	167,951,500,000.00	141,063,595,101.00	83.99	88,328,640,000.00
20	JUMLAH PENDAPATAN	2,362,959,267,805.00	2,428,579,503,649.12	102.78	2,559,857,207,793.86
21	BELANJA				
22	BELANJA OPERASI	2,175,216,112,217.19	1,951,301,711,023.00	89.71	2,025,462,086,541.19
23	Belanja Pegawai	1,134,564,423,225.19	1,010,111,841,189.00	89.03	1,181,889,361,829.00
24	Belanja Barang	859,382,967,805.00	798,841,580,650.00	92.96	711,101,422,815.19
25	Bunga	8,010,000,000.00	5,427,749,091.00	67.76	6,578,046,142.00
26	Hibah	128,766,006,687.00	98,233,837,587.00	72.41	79,149,334,000.00
27	Bantuan Sosial	44,492,714,500.00	43,686,702,506.00	98.19	46,743,921,755.00
28	BELANJA MODAL	307,168,807,801.00	276,157,283,029.00	89.90	501,033,407,778.00
29	Belanja Tanah	7,400,700,000.00	2,772,077,406.00	37.46	18,044,020,000.00
30	Belanja Peralatan dan Mesin	143,259,350,921.00	129,790,481,108.00	90.60	99,754,707,372.00
31	Belanja Gedung dan Bangunan	35,666,473,387.00	30,694,955,339.00	86.06	144,703,165,317.00
32	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117,689,262,659.00	109,784,631,171.00	93.28	235,965,307,071.00
33	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,797,647,834.00	1,789,184,630.00	99.53	1,910,823,018.00
34	Belanja Aset Lainnya	1,355,373,000.00	1,325,953,375.00	97.83	65,385,000.00
35	BELANJA TAK TERDUGA	158,643,578,040.00	126,277,177,930.00	79.60	9,455,600.00
36	Belanja Tak Terduga	158,643,578,040.00	126,277,177,930.00	79.60	9,455,600.00
37	JUMLAH BELANJA	2,641,028,498,058.19	2,353,736,171,982.00	89.12	2,526,504,949,919.19
38	TRANSFER				
39	TRANSFER/BAGI HASIL KE KAB./KOTA/DESA	0.00	0.00	0.00	0.00

40	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
41	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1,134,531,000.00	1,134,531,000.00	100.00	1,995,853,019.00
42	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,134,531,000.00	1,134,531,000.00	100.00	1,023,845,129.00
43	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	972,007,890.00
44	JUMLAH TRANSFER	1,134,531,000.00	1,134,531,000.00	100.00	1,995,853,019.00
45	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2,642,163,029,058.19	2,354,870,702,982.00	89.13	2,528,500,802,938.19
46	SURPLUS / (DEFISIT)	(279,203,761,253.19)	73,708,800,667.12	(26.40)	31,356,404,855.67
47	PEMBIAYAAN				
48	PENERIMAAN DAERAH	388,159,958,113.19	334,337,716,975.19	86.13	401,802,129,830.52
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	277,662,925,853.19	277,640,687,080.19	99.99	256,564,582,703.52
50	Pinjaman Dalam Negeri	75,000,000,000.00	32,159,096,032.00	42.88	139,752,780,949.00
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,497,032,260.00	5,484,766,176.00	99.78	5,484,766,178.00
52	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	30,000,000,000.00	19,053,167,687.00	63.51	0.00
53	PENGELUARAN DAERAH	108,956,196,860.00	80,545,341,402.00	73.92	155,495,608,833.00
54	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28,459,164,600.00	24,300,000,000.00	85.39	16,000,000,000.00
55	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	80,497,032,260.00	56,245,341,402.00	69.87	139,495,608,833.00
56	PEMBIAYAAN NETTO	279,203,761,253.19	253,792,375,573.19	90.90	246,306,520,997.52
57	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	327,501,176,240.31	0.00	277,662,925,853.19

WALI KOTA

Dr. BIMA ARYA

Lampiran 4
Kuesioner Penelitian

A. Identitas Responden

untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas sebagai berikut :

Nama :
Usia :
Pendidikan terakhir :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- a) Sebelum menjawab kuesioner, dimohon untuk melengkapi identitas responden dengan data diri Bapak/Ibu/Saudara/i.
- b) Untuk menjawab kuesioner, silahkan pilih pada salah satu jawaban yang tersedia. Terdapat 4 (empat) alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 - 2 = Tidak Setuju (TS)
 - 3 = Setuju (S)
 - 4 = Sangat Setuju (SS)
- c) Setiap pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban. Jawablah sesuai dengan pendapat dan kondisi Bapak/Ibu sebenarnya dan diharapkan tidak mengosongkan jawaban

C. Item Pertanyaan

1) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010					
2.	Pemerintah kota Bogor menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas					
3.	Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding					
4.	Laporan Realisasi Anggaran disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode pelaporan					
5.	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran					

	membutuhkan waktu lebih dari enam (6) bulan					
6.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyediakan informasi kepada pengguna laporan mengenai indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi					
7.	Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor dilaksanakan secara efektif dan efisien					

Sumber : (Arifah Yuniarti, 2019)

2) Akuntansi Pendapatan

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
8.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor telah menyajikan informasi pendapatan					
9.	Pendapatan diakui ketika diterima dari rekening Kas Umum Daerah					
10.	Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan melakukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)					
11.	Semua informasi pendapatan diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					

Sumber : (Paidy, 2019)

3) Akuntansi Belanja

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
12.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyajikan informasi belanja					
13.	Belanja diakui ketika transaksi dikeluarkan oleh rekening Kas Umum Daerah					
14.	Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan tercantum dalam dokumen pengeluaran					

15.	Semua informasi belanja diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					
-----	---	--	--	--	--	--

Sumber : (Paid, 2019)

4) Akuntansi Transfer

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
16.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyajikan informasi transfer					
17.	Transfer diakui ketika terjadi penerimaan / pengeluaran di rekening Kas Umum Daerah					
18.	Semua informasi belanja diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					

Sumber : (Paid, 2019)

5) Akuntansi Surplus/Defisit

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
19.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyajikan informasi pos surplus/defisit					
20.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit					
21.	Semua informasi surplus/defisit diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					

Sumber : (Paid, 2019)

6) Akuntansi Pembiayaan

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
22.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyajikan informasi pos-pos pembiayaan					
23.	Pembiayaan diakui ketika terjadi penerimaan /					

	pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah					
24.	Semua informasi surplus/defisit diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					

Sumber : (Paidi, 2019)

7) Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
25.	Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Bogor menyajikan informasi pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran					
26.	Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit					
27.	Semua informasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan					

Sumber : (Paidi, 2019)

8) Transaksi Dalam Mata Uang Asing

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
28.	Pemerintah kota Bogor melaksanakan pencatatan transaksi mata uang asing yang dibukukan dalam mata uang rupiah					

Sumber : (Arifah Yuniarti, 2019)

Lampiran 5
Hasil Jawaban Kuesioner

No.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran							Pendapatan				Belanja				Transfer			Surplus/Defisit			Pembiayaan			SiLPA/SiKPA			Transaksi	Total			
	LRA1	LRA2	LRA3	LRA4	LRA5	LRA6	LRA7	P8	P9	P10	P11	B12	B13	B14	B15	T16	T17	T18	SD19	SD20	SD21	PB22	PB23	PB24	SS25	SS26	SS27	TS28				
1	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	127
2	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	135
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	135
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	136
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	131
6	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	125	
7	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	134
8	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	125	
9	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	123	
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	139	
11	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	134
12	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	128
13	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	128	
14	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	124	
15	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	126	
16	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	126	
17	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	127	

Lampiran 6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LRA1	30	4	5	4.90	.305
LRA2	30	4	5	4.70	.466
LRA3	30	4	5	4.80	.407
LRA4	30	4	5	4.63	.490
LRA5	30	4	5	4.40	.498
LRA6	30	4	5	4.50	.509
LRA7	30	4	5	4.67	.479
Pendapatan1	30	4	5	4.73	.450
Pendapatan2	30	4	5	4.70	.466
Pendapatan3	30	4	5	4.63	.490
Pendapatan4	30	4	5	4.53	.507
Belanja1	30	4	5	4.67	.479
Belanja2	30	4	5	4.73	.450
Belanja3	30	4	5	4.63	.490
Belanja4	30	4	5	4.77	.430
Transfer1	30	4	5	4.87	.346
Transfer2	30	4	5	4.63	.490
Transfer3	30	4	5	4.70	.466
SD1	30	4	5	4.70	.466
SD2	30	4	5	4.63	.490
SD3	30	4	5	4.60	.498
Pembiayaan1	30	4	5	4.67	.479
Pembiayaan2	30	4	5	4.47	.507
Pembiayaan3	30	4	5	4.77	.430
SS1	30	4	5	4.70	.466
SS2	30	4	5	4.73	.450
SS3	30	4	5	4.70	.466
Transaksi	30	4	5	4.60	.498
Valid N (listwise)	30				

Lampiran 7
Hasil Uji Validitas

1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

		Correlations							
		LRA1	LRA2	LRA3	LRA4	LRA5	LRA6	LRA7	Total
LRA1	Pearson Correlation	1	.024	.389*	-.023	.045	-.111	.000	.374
	Sig. (2-tailed)		.899	.034	.904	.812	.559	1.000	.143
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA2	Pearson Correlation	.024	1	.218	.257	-.208	.073	.000	.397*
	Sig. (2-tailed)	.899		.247	.171	.270	.702	1.000	.030
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA3	Pearson Correlation	.389*	.218	1	.138	.068	.000	.177	.519**
	Sig. (2-tailed)	.034	.247		.466	.721	1.000	.350	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA4	Pearson Correlation	-.023	.257	.138	1	.056	.346	.049	.566**
	Sig. (2-tailed)	.904	.171	.466		.767	.061	.797	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA5	Pearson Correlation	.045	-.208	.068	.056	1	.136	.433*	.477**
	Sig. (2-tailed)	.812	.270	.721	.767		.473	.017	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA6	Pearson Correlation	-.111	.073	.000	.346	.136	1	.283	.563**
	Sig. (2-tailed)	.559	.702	1.000	.061	.473		.130	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
LRA7	Pearson Correlation	.000	.000	.177	.049	.433*	.283	1	.597**
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	.350	.797	.017	.130		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.274	.397*	.519**	.566**	.477**	.563**	.597**	1
	Sig. (2-tailed)	.143	.030	.003	.001	.008	.001	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Akuntansi Pendapatan

		Correlations				
		Pendapatan1	Pendapatan2	Pendapatan3	Pendapatan4	Total
Pendapatan1	Pearson Correlation	1	-.066	.480**	-.111	.479**
	Sig. (2-tailed)		.730	.007	.560	.007

	N	30	30	30	30	30
Pendapatan2	Pearson Correlation	-.066	1	.257	.554**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.730		.171	.001	.000
	N	30	30	30	30	30
Pendapatan3	Pearson Correlation	.480**	.257	1	.259	.766**
	Sig. (2-tailed)	.007	.171		.167	.000
	N	30	30	30	30	30
Pendapatan4	Pearson Correlation	-.111	.554**	.259	1	.675**
	Sig. (2-tailed)	.560	.001	.167		.000
	N	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.479**	.676**	.766**	.675**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Akuntansi Belanja

		Correlations				
		Belanja1	Belanja2	Belanja3	Belanja4	Total
Belanja1	Pearson Correlation	1	.213	.049	.111	.591**
	Sig. (2-tailed)		.258	.797	.558	.001
	N	30	30	30	30	30
Belanja2	Pearson Correlation	.213	1	.167	.202	.658**
	Sig. (2-tailed)	.258		.378	.284	.000
	N	30	30	30	30	30
Belanja3	Pearson Correlation	.049	.167	1	.071	.565**
	Sig. (2-tailed)	.797	.378		.710	.001
	N	30	30	30	30	30
Belanja4	Pearson Correlation	.111	.202	.071	1	.556**
	Sig. (2-tailed)	.558	.284	.710		.001
	N	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.591**	.658**	.565**	.556**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Akuntansi Transfer

		Correlations			
		Transfer1	Transfer2	Transfer3	Total
Transfer1	Pearson Correlation	1	.109	.171	.518**

	Sig. (2-tailed)		.568	.366	.003
	N	30	30	30	30
Transfer2	Pearson Correlation	.109	1	.408*	.776**
	Sig. (2-tailed)	.568		.025	.000
	N	30	30	30	30
Transfer3	Pearson Correlation	.171	.408*	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.366	.025		.000
	N	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.518**	.776**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Akuntansi Surplus/Defisit

Correlations

		SD1	SD2	SD3	Total
SD1	Pearson Correlation	1	-.045	.208	.630**
	Sig. (2-tailed)		.812	.270	.000
	N	30	30	30	30
SD2	Pearson Correlation	-.045	1	-.056	.508**
	Sig. (2-tailed)	.812		.767	.004
	N	30	30	30	30
SD3	Pearson Correlation	.208	-.056	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.270	.767		.000
	N	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.630**	.508**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6. Akuntansi Pembiayaan

Correlations

		Pembiayaan1	Pembiayaan2	Pembiayaan3	Total
Pembiayaan1	Pearson Correlation	1	.236	.279	.699**
	Sig. (2-tailed)		.209	.136	.000
	N	30	30	30	30
Pembiayaan2	Pearson Correlation	.236	1	.358	.753**

	Sig. (2-tailed)	.209		.052	.000
	N	30	30	30	30
Pembiayaan3	Pearson Correlation	.279	.358	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.136	.052		.000
	N	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.699**	.753**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Akuntansi SiLPA/SiKPA

Correlations

		SS1	SS2	SS3	Total
SS1	Pearson Correlation	1	.099	.206	.623**
	Sig. (2-tailed)		.604	.274	.000
	N	30	30	30	30
SS2	Pearson Correlation	.099	1	.428*	.714**
	Sig. (2-tailed)	.604		.018	.000
	N	30	30	30	30
SS3	Pearson Correlation	.206	.428*	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.274	.018		.000
	N	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.623**	.714**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Correlations

		Transaksi1	Total
Transaksi1	Pearson Correlation	1	1.000**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Total	Pearson Correlation	1.000**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8
Hasil Uji Reliabilitas

1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.476	7

2. Pendapatan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.549	4

3. Belanja

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.381	4

4. Transfer

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.488	3

5. Surplus/defisit

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.096	3

6. Pembiayaan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.547	3

7. SiLPA/SiKPA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.492	3

8. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
1.000	1